



Sultan Persilakan Hotel Kembali Buka

Destinasi Wisata Wajib Terapkan Protokol Kesehatan

PUTAR RODA EKONOMI

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyebut masa tanggap darurat tidak bertujuan untuk mempersulit operasionalnya kembali hotel dan objek wisata.

YOGYA, TRIBUN - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menjelaskan roda perekonomian harus tetap berputar di masa pandemi ini. Ia pun menegaskan masa tanggap darurat tidak bertujuan untuk mempersulit operasionalnya kembali hotel dan objek wisata untuk kembali meraup wisatawan.

Sultan juga meminta semua hal yang berkaitan dengan pariwisata harus dijalankan sesuai dengan protokol kesehatan. "Jadi memang ekonomi Yogya harus tumbuh dalam kondisi-

si masih pandemi. Tapi tidak ada pilihan. Saya komunikasi juga sama para Bupati. Jadi bagi saya, tidak ada masalah, silakan buka. Kalau mau buka hotel, rumah makan, mau buka objek wisata, dan sebagainya, silakan. Tapi tetap

ke halaman 15



1.
2.
3.
4.
5.

☐ Positif
☐ Netral

- Pemda mempersiapkan operasional hotel, rumah makan, mau buka objek wisata.
- Aktivitas ekonomi dan wisata diminta untuk tetap menjalankan protokol kesehatan.
- Pemkot Yogyakarta telah mengembangkan QR Code sebagai identitas untuk masuk Malioboro.
- Ada lima zona di sepanjang Malioboro hingga Titik Nol Kilometer.
- Zona satu adalah Hotel Grand Inna Malioboro hingga Malioboro.
- Zona dua adalah Malioboro hingga Hotel Mutiara.
- Zona tiga adalah Halte Trans 2 hingga Suryatmajan.
- Zona empat adalah Suryatmajan hingga Pabringan.
- Zona lima adalah Pabringan hingga Titik Nol Kilometer.

GRAFIK/VEGGIARASMAN

Sultan Persilakan

● Sambungan Hal 9

satu, gunakan protokol kesehatan harus," tegasnya di Kompleks Kepatihan, Kamis (2/7).

Sultan mengaku telah menelepon seluruh Bupati di DIY untuk mempersilakan mereka membuka tempat wisata. Namun ada catatan penting yang disampaikan pada seluruh kepala daerah tersebut, yakni memikirkan kondisi terburuk bila sewaktu-waktu ada wisatawan yang dinyatakan positif saat berkunjung di objek wisata dan bagaimana upaya tracing yang bisa dilakukan.

"Kalau yang datang pada jam yang sama itu orang Semarang, Surabaya, bagaimana kami akan tracing. Bapak (Bupati) lakukan nggak? Nggak. Hanya masuknya di *thermo gun* aja. Nanti saya sehat atau siapapun yang sehat pada waktu ke Parangtritis atau Kaliurang tapi begitu pulang dari sana kebetulan bukan orang Yogya diperiksa positif. *Piye arep tracing?* itu kesulitan," ungkapnya.

Ia menambahkan, Pemkot Yogyakarta telah mengembangkan *QR Code* sebagai identitas untuk masuk Malioboro, Sultan pun berharap setiap tempat nantinya selain menerapkan protokol kesehatan juga memiliki data pengunjung, mulai nama, jam masuk, hingga nomor gawai pengunjung.

"Nama siapa, HP nomornya berapa, dari Malioboro kalau ke Parangtritis, Mangunan, Dlingo, Breksi, dan sebagainya data itu masukan ke provinsi untuk ID yang ada di provinsi supaya data HP dan ada nama, nggak usah data lagi. Jadi cukup sekali. Nanti di situ ada jam pada waktu masuk. Jam masuk itu ada di antara mereka yang akhirnya positif, itu *tracing*nya di dalam daftar ada. Jam sekian, nomor HP sekian, dari Yogya, oh ini dari Solo sehingga kami tidak kesulitan. Kalau nggak, nanti Covid ke dua yang terjadi, tapi kami kesulitan *tracing*," urai Sultan.

Selama tanggap darurat ini, lanjutnya, kejadian kasus baru yang banyak mencuat yakni pelaku perjalanan dari DIY ke luar DIY dan kembali ke DIY dengan membawa status positif Covid-19. Kondisi tersebut yang membuat Pemda DIY kesulitan memprediksi apakah kasus di DIY telah mencapai puncak dan melandai atau masih belum mencapai puncak.

"Sekarang landai, naik lagi. Saya tidak mau tergesa-gesa sampai kami lihat dibukanya pariwisata dan sebagainya kecenderungan positif besar atau kecil. Pasar yang coba kami tata walau tidak mudah, nanti kecenderungan besar atau kecil," bebernya.

Raja Keraton Yogyakarta tersebut mengungkapkan salah satu alasan mendasar dalam memperpanjang masa tanggap darurat DIY adalah un-

tuk mempercepat prosedur penanganan Covid-19.

"Dalam keadaan darurat, memudahkan saya untuk mengobati yang positif. *Nek darurat tak cabut, onok sing positif arep ngobati nganggo PCR Swab, aku kudu lelang, kan susah. Lelang kudu 45 dino*. Tapi dengan kondisi darurat kan tinggal beli tapi dipertanggungjawabkan," ucapnya.

"Hotel mau buka dan sebagainya, silakan. Jangan merasa terganggu karena darurat. Darurat itu hanya untuk saya bisa mengambil kebijakan dalam mengaplikasikan untuk ngerem Covid-19," pungkasnya.

Kembali beroperasi

Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eriyono mengatakan saat ini sudah hampir 70 hotel yang kembali beroperasi. Pihaknya memastikan hotel yang saat ini beroperasi sudah menerapkan protokol pencegahan COVID-19, termasuk infrastruktur dan sumber daya manusianya.

"Memang dari awal PHRI sudah tegas, kalau buka harus menerapkan protokol kesehatan. Kalau tidak ya ada sanksi yang kita keluarkan. Kami sudah mendapat panduan dari PHRI pusat, sudah disetujui oleh Kemenpar dan Kemenkes. Kami di DIY bersama Dispar DIY juga membuat protokol serupa," katanya pada *Tribun Jogja*, Kamis (2/7) malam.

Menurut dia, yang harus

menjadi perhatian Pemerintah Daerah DIY adalah hotel dan restoran yang belum menjadi anggota PHRI. Saat ini anggota PHRI hanya sekitar 400an saja, sementara masih ada 1.000 hotel dan restoran yang belum menjadi anggota PHRI.

"Yang kami khawatirkan adalah yang bukan anggota PHRI. Kalau anggota PHRI bisa kita kontrol, tetapi kalau bukan anggota ini bagaimana? Makanya pemerintah, baik DIY, kabupaten dan kota juga harus ikut kontrol mereka," ungkapnya.

"Karena kalau satu saja yang kena (terpapar COVID-19) yang kena (terdampak) bukan hanya hotel atau restoran itu saja, tetapi hotel dan restoran lain, termasuk pariwisata DIY. Dampaknya sangat luas, makanya harus diwaspadai," sambungnya.

Dengan adanya dukungan dari Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X yang mengizinkan hotel, restoran, dan destinasi wisata, pihaknya mengaku memiliki harapan dan optimisme.

"Tentu ini jadi harapan dan optimisme kami, dari pertama hanya 25 hotel yang buka, kemudian Juli tambah 20, dan sekarang sudah hampir 70. Kita harus benar-benar mempromosikan bahwa DIY siap menerima tamu. Tentu harus menerapkan protokol kesehatan, yang pasti harus bersih, sehat, dan aman," tambahnya. (kur/maw)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pariwisata			

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005